



Pentingnya CGCAE bagi Pimpinan APIP

Adalah kenyataan, bahwa kebanyakan Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik di lingkungan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah bukan berasal dari pejabat fungsional auditor atau berlatarbelakang non-audit. Oleh karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memandang perlu memberikan sertifikasi Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) bagi Pimpinan APIP.

Peluncuran program sertifikasi CGCAE tersebut diselenggarakan pada 30 November 2020 lalu, BPKP selaku pembina Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentunya sangat berkepentingan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP agar lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui sertifikasi CGCAE bagi pimpinan APIP.

Pada acara peluncuran CGCAE tersebut, sebagaimana dikutip dari website BPKP.go.id (30/11/2020), Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, peningkatan kompetensi bagi pimpinan APIP memainkan peranan krusial dalam menentukan seberapa optimal APIP menjalankan tugasnya. "BPKP telah mengembangkan program pendidikan supaya audit dilaksanakan oleh auditor yang kompeten supaya dapat menjaga

mutu. Namun, hal itu dirasa belum cukup. Peningkatan kompetensi juga diperlukan untuk para pimpinan APIP," jelasnya.

Melalui sertifikasi ini, para pimpinan APIP yang berlatar belakang non-audit akan dibekali kemampuan untuk berpikir holistik agar bisa memfokuskan SDM APIP yang memberikan value kepada manajemen. Program CGCAE, dikatakan Yusuf Ateh, harus disusun sesuai kebutuhan, seperti pengetahuan mendalam dan analisis proses bisnis lingkungan untuk mengidentifikasi titik kritis dan risiko strategis yang dapat mengganggu pencapaian tujuan.

Turut hadir dalam acara peluncuran CGCAE tersebut di antaranya adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Basuki Hadi Mulyono, dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati. Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam sambutannya menyatakan, BPK mendukung upaya BPKP untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi kepada Pimpinan APIP. Sebab BPK merasa terbantu jika para APIP telah berkualifikasi profesional. "Berhasil tidaknya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tergantung pada kompetensi pimpinan dalam mengimplementasikan lingkungan pengendalian secara menyeluruh," ujar Agung.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pimpinan APIP sangat strategis untuk mengawal program pembangunan, seperti pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman, dan perumahan. "Saya sangat mengapresiasi, sebagai bentuk tanggung jawab BPKP terhadap kinerja APIP yang dibina selama ini. Dengan CGCAE ini, pimpinan APIP kayak saya (yang berlatar belakang non-audit) punya standar minimal dan profesionalisme yang sama," sebutnya.

Sementara, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati menyatakan, harus ada langkah *extraordinary* di lingkungan APIP agar bisa melewati tantangan untuk mencapai APIP yang efektif dalam rangka mendorong penggunaan APBN yang efektif dan efisien.

Sertifikasi CGCAE

Apa yang disampaikan oleh Kepala BPKP tersebut adalah benar adanya. Seperti kita ketahui, pimpinan APIP baik pusat maupun daerah senyatanya banyak yang berlatar belakang non audit. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kapabilitas APIP dalam pemberdayaan tugas pengawasan agar lebih optimal. Melalui sertifikasi CGCAE diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan

kompetensi pimpinan APIP, terutama dalam hal pencegahan korupsi, peringatan dini atau *early warning system*, serta mengawal keuangan dan pembangunan di lingkungan Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah.

Pada sertifikasi CGCAE terdapat tiga materi utama, yakni Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal (TKMRPI); Audit Internal, dan Kebijakan Pengawasan. Di samping itu, untuk mendapatkan sertifikat CGCAE maka para peserta pelatihan wajib menjalani uji kompetensi.

Dengan adanya program sertifikasi CGCAE tentunya memberikan manfaat yang signifikan bagi APIP. Dalam hal ini, ada tiga manfaat yang diperoleh dari sertifikasi CGCAE. Pertama, membantu para pimpinan APIP yang sudah menduduki jabatan untuk mengembangkan kompetensi dan mengikuti ujian sertifikasi CGCAE. Kedua, sertifikasi CGCAE ini dapat diikuti oleh para pegawai yang memiliki kemampuan untuk menjadi pimpinan APIP. Ketiga, sertifikasi CGCAE dapat membantu para pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam menentukan calon pimpinan APIP.

Mengingat penting dan bermanfaatnya sertifikasi CGCAE tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Masrokan, tak melewatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan CGCAE Angkatan ke-16 yang diselenggarakan oleh BPKP bertempat di Hotel Double Tree, Jakarta, pada 18 – 19 Oktober lalu. Khusus Angkatan ke-16 ini diikuti oleh 30 orang pejabat Eselon 1 Kementerian/Lembaga.

Dalam pelatihan CGCAE tersebut, sistem pembelajaran dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: Pembelajaran mandiri dari kedudukan masing-masing pada 11-17 Oktober 2021; Tatap muka selama 2 hari, yang dipecah menjadi dua kelas, yaitu Kelas A dan Kelas B. Kelas A diikuti oleh

17 peserta pada tanggal 18-19 Oktober, sedangkan kelas B diikuti 13 peserta pada tanggal 21-22 Oktober 2021. Selanjutnya, Uji makalah selama satu hari pada tanggal 1 November 2021 untuk Kelas A dan 2 November 2021 untuk kelas B. Uji makalah tersebut dilakukan dari tempat masing-masing secara daring.

Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhon se usai mengikuti Pelatihan CGCAE menyatakan kepuasannya atas berbagai materi pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan tersebut. Berbekal pengetahuan tentang manajemen pengawasan dan audit intern yang diperolehnya selama mengikuti Pelatihan CGCAE, beliau bertekad untuk lebih meningkatkan kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenperin, Wawas Swathafrijiah juga telah mengikuti Pelatihan CGCAE yang diselenggarakan oleh BPKP. Pelatihan tersebut dimulai pada 23 Agustus s/d 3 September 2021 untuk pembelajaran mandiri dari kedudukan masing-masing. Selanjutnya, pada 6 – 9 September 2021 diselenggarakan acara pembukaan dan pelatihan secara daring. Pelatihan CGCAE Angkatan ke-13 ini diikuti oleh 22 peserta yang mewakili pejabat

Eselon II di lingkungan APIP Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. Sedangkan uji kompetensi diselenggarakan secara daring pada 15 – 16 September 2021 dari materi diklat yang meliputi: Audit Intern, Tatakelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, serta Kebijakan Pengawasan.

Keikutsertaan Inspektur Jenderal dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenperin dalam Pelatihan CGCAE tentunya tak terlepas dari upaya mendukung terciptanya pengawasan intern yang efektif melalui peningkatan kompetensi teknis bidang pengawasan intern dari pimpinan APIP. Atas keikutsertaan dalam Pelatihan CGCAE tersebut, Wawas Swathafrijiah menyatakan bahwa manfaatnya sangat besar terutama jika pimpinan APIP bukan berasal dari pejabat karier sebagai auditor/pegawai Inspektorat Jenderal.

Sertifikasi CGCAE jelas sangat dibutuhkan bagi Pimpinan APIP, sebagai upaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan intern yang efektif dan berdaya guna.

(Edwardsyah Nurdin)

